

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN
POLITIK PEMUDA
Studi atas Peran Pimpinan Wilayah Pemuda
Muhammadiyah Aceh

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
RIZKY REZA BAIZURY
NIM. 180801008



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2024 M / 1446 H

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEMUDA
Studi atas Peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh

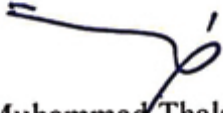
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

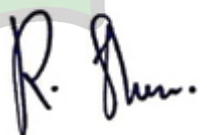
RIZKY REZA BAIZURY
NIM. 180801008
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing


Muhammad Thalal, Lc. M.Ed, M.Si
NIP. 197810162008011011

Ketua Program Studi


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEMUDA

Studi atas Peran Pimpinan Wilayah Pemuda

Muhammadiyah Aceh

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.

NIP. 197810162008011011

NIP. 198605132019032009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

Melly Masni, M.I.R

NIP. 197403271999031005

NIP. 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizky Reza Baizury

Nim : 180801008

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

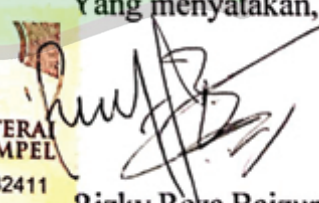
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 09 Juli 2024

Yang menyatakan,




Rizky Reza Baizury

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEMUDA Studi atas Peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh”**

Selanjutnya shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada Keluarga, Para Sahabat, dan Para alim ulama. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

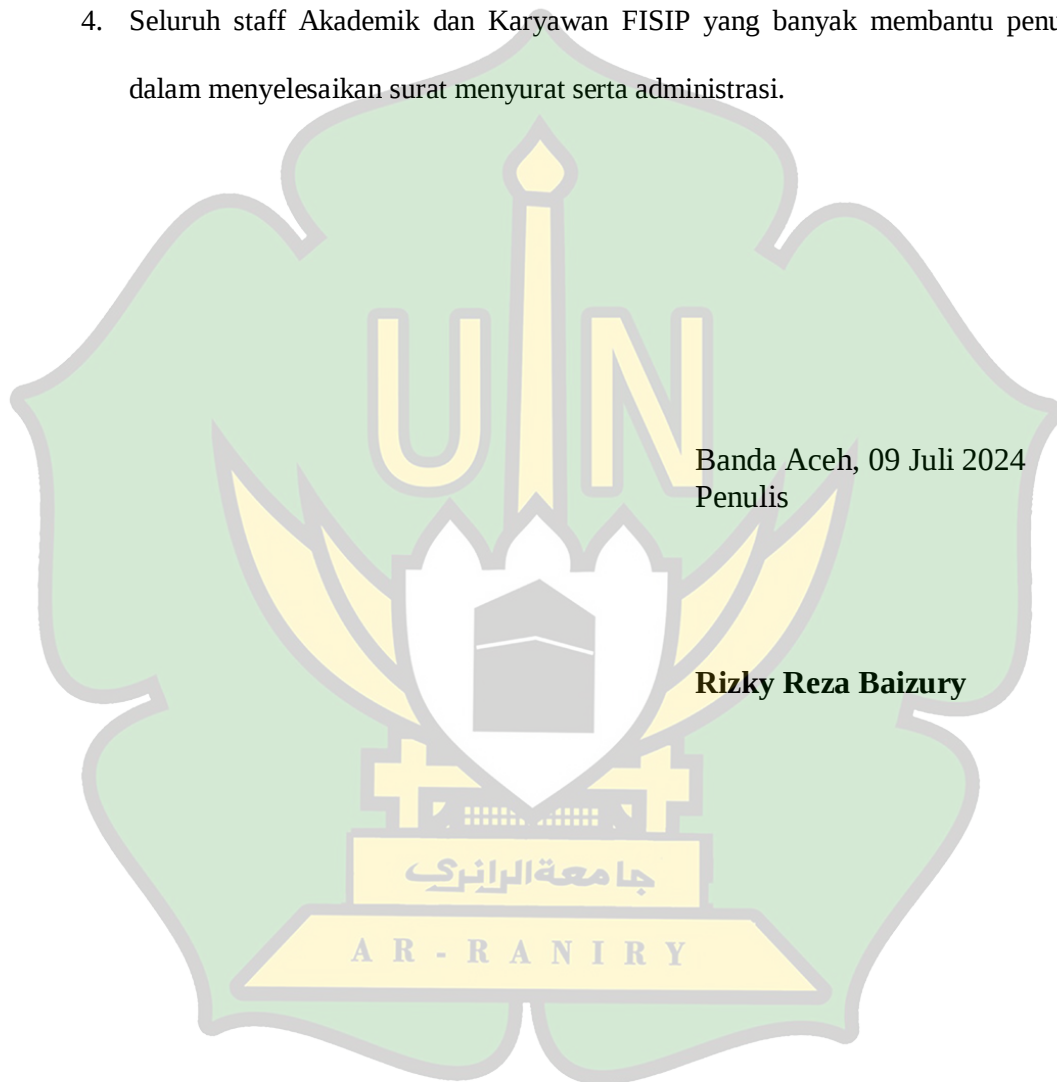
Penulisan Skripsi ini dapat selesai tentunya Tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan masukan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc. M.Ed, M.Si. Berkat bimbingan dari bapak yang telah memberikan motivasi, kritik, serta saran yang sangat membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima Kasih yang paling teristimewa kepada keluarga terutama kedua orangtua dan saudara-saudara, Terimakasih atas doa dan support nya dan terimakasih juga kepada jiwa ini yang telah melewati tahap demi tahap untuk dapat menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
4. Seluruh staff Akademik dan Karyawan FISIP yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan surat menyurat serta administrasi.



Banda Aceh, 09 Juli 2024
Penulis

Rizky Reza Baizury

ABSTRAK

Nama : Rizky Reza Baizury
Nim : 180801008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul : Civil Society dan Pendidikan Politik Pemuda Studi atas Peran
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh
Pembimbing : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed

Konsep *civil society* merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Dimana konsep ini merupakan elemen yang penting jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. PWPM Aceh merupakan salah satu organisasi dengan basis pemuda dibawah Pimpinan PWM Aceh. Sebagai salah satu kelompok *civil society*, organisasi ini melaksanakan salah satu tanggung jawab sosialnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya melakukan pendidikan politik khususnya pemuda di internal organisasi dengan memakai konsep peran dan pendidikan politik sebagai pisau analisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana peneliti berupaya mendeskripsikan data yang diperoleh dilapangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh; Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh telah melaksanakan pendidikan politik yang merupakan upaya untuk mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai kepada kader mengenai politik yang dituangkan ke dalam program kerja seperti diskusi, seminar ataupun workshop dengan memanggil narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, pendidikan politik juga dilakukan secara khusus dengan memasukan materi saat proses perkaderan sedang berlangsung baik perkaderan tingkat dasar maupun paripurna. Sehingga dengan demikian PWPM Aceh bisa melakukan perannya sebagaimana tertuang visi dan misi.

Kata Kunci : Pendidikan Politik Pemuda Studi, Peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Peran	13
2.3 Civil Society.....	16
2.4 Pendidikan Politik	24
2.5 Kerangka Pemikiran	30
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data	35
 BAB IV : DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh.....	38
4.1.1 Sejarah Pemuda Muhammadiyah	38
4.1.2 Visi dan Misi Pemuda Muhammadiyah.....	39
4.1.3 Prinsip Dasar Organisasi	40
4.1.4 Jaringan Struktural PWPM Aceh.....	41
4.1.5 Garis-Garis Besar Haluan Gerakan.....	41
4.2 Pendidikan Politik Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh.....	43
4.3 Peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh Dalam Pendidikan Politik	52
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya.¹ Dibeberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (*golput*) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput, memberikan sanksi tegas pihak *money politics*, Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat.²

Indonesia telah mengalami transisi kekuasaan beberapa kali sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dikumandangkan. Mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga Pasca-Reformasi. Masyarakat Indonesia sempat mengalami kesulitan dan represi dalam berpendapat, berserikat, dan bermufakat dalam urusan-urusan yang substansial maupun kasual pada masa

¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 50

²Sulistyaningsih dan Hijri, Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 1 No 1, 2018, hlm. 4.

Orde Baru.³ Kerana demokrasi baru benar-benar terbuka cukup lebar saat kepemimpinan pemerintahan beralih dari tangan Soeharto kepada Gus Dur.

Tak hanya itu, transisi kekuasaan tersebut juga menandai munculnya satu kesadaran bersama yang pada tahap selanjutnya diterjemahkan ke dalam sebuah gerakan kultural oleh sekelompok masyarakat di berbagai daerah. Kelak, tren ini disebut sebagai masyarakat sipil (*civil society*), yang pada banyak momentum dan peristiwa mereka hadir, dengan tugas utama sebagai suara kritis dari pemerintahan yang berkuasa.

Masifnya gerakan untuk turun ke jalan dalam rangka memprotes kebijakan yang merugikan rakyat, seperti terlihat dalam rangkaian demo menolak RUU KPK, RUU Minerba, pasal bermasalah dalam RKUHP, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta munculnya tren untuk membuat petisi atau kampanye melalui media sosial dalam menentang kebijakan yang tidak pro-rakyat merupakan arus baru yang lahir dari perkembangan teknologi mutakhir.⁴ Menurut Parmudi, kebangkitan masyarakat sipil di Indonesia ini termanifestasi dalam tiga jenis gerakan sosial, yakni sebagai resistensi simbolik yang meliputi berbagai aksi langsung untuk mengontrol dominasi negara; resistensi pragmatis sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah atau sistem sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berjalan; serta resistensi simbolik pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung dengan tuntutan untuk terciptanya situasi

³Muhajir & Febriyanti Wulandari, "Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik," *Warisan* Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 7.

⁴Asrida, Marta, & Hadi, Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 20, No 2, 2021, hlm. 133.

sosial dan politik yang lebih baik.⁵

Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Salah satu bentuk nyata dari pemberian ruang perjuangan untuk masyarakat adalah *civil society*. Diskursus terkait implementasi *civil society* di negara dengan iklim demokrasi sejatinya telah mengalami pasang surut. Keberadaan *civil society* dianggap sebagai sesuatu yang natural dan lahir atas proses interaksi dari masyarakat dalam ruang publik yang bebas dan dijamin oleh Negara (Demokrasi). Indonesia sampai hari ini menjadi salah satu negara yang dianggap menarik untuk melihat keberadaan dan perkembangan dari *civil society*. Tidak semata-mata berdasarkan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar tapi juga faktor lain seperti keberagaman kelompok, konflik golongan dan ideologi serta sejarah Panjang pergerakan politik nasional.⁶

Konsep *civil society* merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Dimana konsep ini merupakan elemen yang penting jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. Konsep *civil society* atau yang sering disebut masyarakat sipil terkadang dipertentangkan dengan konsep negara.⁷ Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan *civil society*. Jika rezim yang berkuasa

⁵Parmudi, Kebangkitan Civil Society di Indonesia, *At-Taqaddum* Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 295.

⁶Erfain, Penguatan Civil Society Menuju Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3, Desember 2022, hlm. 237.

⁷Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdaya Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 20.

tersebut bersifat otoritarian bahkan totalitarian maka tidak akan terbentuk *civil society*, dan dalam suatu negara yang demokratis maka dapat ditemukan *civil society* yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh merupakan salah satu organisasi dengan basis pemuda dibawah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) yang ada di Aceh. Sebagai salah satu *kelompok civil society*, organisasi ini melaksanakan salah satu tanggung jawab sosialnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya melakukan pendidikan politik khususnya pemuda di internal organisasi serta masyarakat umum dengan memakai konsep peran dan pendidikan politik sebagai pisau analisisnya.

Pendidikan politik terbagi dalam dua pengertian. *Pertama*, pendidikan politik internal, yang difokuskan pada pihak internal suatu organisasi. Penulis akan berfokus kepada kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh yang menargetkan kepada kadernya. *Kedua*, pendidikan politik untuk pihak umum atau eksternal, yakni pendidikan politik yang berusaha mendidik masyarakat agar memiliki pemahaman politik melalui cara yang tersistem dan terpola. Diharapkan nantinya masyarakat mempunyai rasa kepedulian mengenai urusan-urusan politik dan bisa bertanggung jawab dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak di antaranya yang masih berada pada keterbelakangan

dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan guna merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam gerak pembangunan.⁸

Negara dan bangsa ini membutuhkan talenta-talenta yang mumpuni untuk membangun negaranya dan terus berjuang demi terwujudnya tujuan nasional. Oleh karena itu, saya berharap ke depan akan muncul generasi muda pemimpin bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam upaya menjalin hubungan sosial antar negara yang berbeda, sangat penting untuk mengembangkan wawasan kebangsaan. Salah satu cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan adalah dengan memanfaatkan pendidikan sebagai upaya alternatif.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh sebagai sebuah organisasi informal dan atau forum tempat berkumpulnya pemuda yang salah satu fungsinya untuk mengembangkan kemampuan pemuda. Dimana organisasi ini menginginkan anak muda mendapatkan bimbingan yang baik dalam pengembangan organisasi kepemudaan. Konsep pengembangan kemampuan remajasebagai sumber daya manusia mengacu pada pandangan yang saling berkaitan satusama lain, dan juga mengacu pada kemampuan kerja melalui berbagai kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi (keterampilan dan bisnis). Selain menyediakan forum atau ormas khusus dan sharing kebijakan secara politik dan ekonomi, mereka juga harus mampu memberikan dukungan yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas SDM pemuda. Terakhir, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pengurangan

⁸Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm. 12.

pengangguran.

Berangkat dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh. Maka penelitian ini peneliti kaji dalam proposal skripsi dengan judul **“CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEMUDA Studi atas Peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh dalam Pendidikan Politik Pemuda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu: Untuk mengetahui peran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh dalam Pendidikan Politik Pemuda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi pada ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam studi *civil society* dan pendidikan politik pemuda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan gambaran tentang peran *civil society* dan pendidikan politik pemuda.

1.5 Penjelasan Istilah

1. Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.⁹ Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.

2. Civil Society

Hegel menjelaskan konsepsi *civil society* dengan menyebutkan istilah “*Bürgergesellschaft*”, yang mana ruang antara keluaran negara, dan pasar yang memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum.¹⁰

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah pemberian pendidikan untuk mencapai aktualisasi diri dari individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. Salah satu tujuan dari pendidikan politik adalah kaderisasi partai politik.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Persada: 2012), hlm. 243

¹⁰Asrida dkk, *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 20 No. 02 Tahun 2021, hlm. 132.

¹¹Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm. 9.